

## **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBAGUNAN EKONOMI DI KAMPUNG BENYOM JAYA DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA**

**Robert A Steven Antoh<sup>1</sup>**

**Mesak Iek<sup>2</sup>**

**Sarlota A. Ratang<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Pemberian dana desa dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yakni (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, (2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya, Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, (3) Untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahun 2017-2021, sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan masyarakat kampung benyom jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 96% pengelolaan dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kampung benyom jaya, persepsi masyarakat cukup positif terhadap penggunaan dana desa, penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi kampung belum efektif.

**Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Kampung**

### **PENDAHULUAN**

Desa memiliki struktur ekonomi yang sangat sederhana, dengan adanya pandemic covid-19 ekonomi desa mengalami sedikit guncangan. ekonomi desa terdampak Covid-19 perlu untuk mengantisipasi karena ekonomi kerakyatan yang menjadi pusatnya, pemerintah harus memulai pembagunan uang desa, pada tahun 2021, Menteri Keuangan RI akan mengalokasikan Rp. 72 triliun untuk dana desa. Anggaran tersebut berfokus pada peningkatan dana pelaksanaan desa dan mendukung pemulihan ekonomi dan sektor-sektor utama. Dana desa diproyeksikan kepada sektor yang berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Sebagai stimulan yang memiliki potensi dalam mentransformasikan dan memperlancar roda pertumbuhan ekonomi masyarakat di kampung, keberadaan dan penggunaan dana desa merupakan komponen penting. Prioritas utama dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala kecil atau lokal desa yang bertujuan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan. Pengalokasian Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai berbagai bidang pembangunan di desa, akan tetapi prioritas utamanya adalah untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Salah satu tujuan dari dana desa adalah membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kementerian Keuangan, tahun 2020 Kabupaten Jayapura memperoleh Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 134.025.765.000. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Kampung sebesar Rp. 720.442.000, pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga besaran ADD untuk tiap-tiap kampung sebesar Rp.

---

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

672.421.000 atau sebesar 0,66 persen, dan tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 662.806.000 atau sebesar 0,014 persen. Kampung Benyom Jaya adalah salah satu kampung yang terletak di Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura yang telah memperoleh penerimaan Dana Desa Tahap satu pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 67.870.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa program utama seperti pemberdayaan masyarakat kampung, pembangunan infrastruktur kampung dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian tentang efektivitas dana desa menunjukkan hasil yang beragam, Yunia Novita Sari tahun (2017) kebijakan dana kampung memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat kampung, Pangke, Kumenaung, and Tumilaar (2021) penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tamako sangat efektif, Demaris Deisy Pasuhuk, Johannis Kaawoan (2021) dana desa yang diperuntukan dalam peningkatan air bersih ini sudah efektif dan telah terealisasi dengan baik, Irmansyah, Mustafa, and Hamid (2021) efektivitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Rompu dinilai tepat, Karina Poluan, Florence D. J. LEngkong (2021) penggunaan dana desa sudah tercapai dalam aspek ketepatan sasaran, pemahaman program, pencapaian tujuan dan perubahan nyata yang mana dapat dikategori sebagai tercapainya efektivitas program pembangunan infrastruktur desa, namun dalam hal ketepatan waktu belum dapat dikategorikan belum efektif. Penelitian terdahulu tersebut mengkaji efektivitas dana desa dari aspek ketepatan sasaran dan realisasinya, sedangkan dalam penelitian ini efektivitas dana desa dilihat dari perbandingan realisasi dengan target yang ditentukan dengan menggunakan rumus efektivitas. Fokus penelitian ini terletak pada penggunaan dana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara awal yang penulis lakukan pada Kepala Kampung Benyom Jaya mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan pada peningkatan kemampuan wirausaha dengan memberikan anggaran sekitar Rp. 100.000.000. Adapun program pembangunan infrastruktur menghabiskan anggaran sekitar Rp. 300.000.000, sedangkan program peningkatan ekonomi masyarakat menghabiskan anggaran sekitar Rp. 100.000.000. Dengan kurcun dana tersebut seharusnya mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kampung, namun kenyataannya berdasarkan pengamatan penulis di lapangan menunjukkan tidak terjadi perubahan yang cukup baik. Hal tersebut mengindikasikan ada kecenderungan pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya Kabupaten Jayapura, (2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya Kabupaten Jayapura, dan (3) Untuk menganalisis eektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya Kabupaten Jayapura.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Sugiyono (2016), mengartikan data primer sebagai sebuah data yang secara langsung diperoleh dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Jenis data primer yang diperlukan dalam penelitian adalah Pendapatan Masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat. Data-data tersebut bersumber dari responde yang merupakan masyarakat kampung Benyom Jaya

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku laporan, dokumen yang telah diolah sebelumnya. Data sekunder ialah separuh sumber data yang didapatkan melalui membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012). Jenis data sekunder dalam penelitian ini yakni Laporan kegiatan Kampung Benyom Jaya tahun anggaran 2017-2021.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang. Setelah populasi ditentukan langkah selanjutnya adalah menetapkan sampel penelitian.

Pandangan Arikunto (Dalam Riduwan 2012:56) sampel ialah separuh dari populasi (sebagai wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah masyarakat Kampung Benyom Jaya I. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi 2.330. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 20 tahun ke atas. Pemilihan sampel pada populasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik Stratified random sampling (Pengambilan Sampel Acak Berstrata).

Pengambilan Sampel Acak Berstrata adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan (strata) pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen dengan jumlah 50 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa Pendapatan Masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat. Data-data tersebut bersumber dari responden yang merupakan masyarakat kampung Benyom Jaya yang diperoleh dengan membagikan kuesioner, Jenis data sekunder dalam penelitian ini yakni Laporan kegiatan Kampung Benyom Jaya tahun anggaran 2017-2021 yang bersumber dari dokumentasi Kampung Benyom Jaya. Penelitian ini terdiri dari 2 informan kunci, dan 50 responden. Responden dipilih dengan menggunakan teknik Stratified random sampling (Pengambilan Sampel Acak Berstrata) yang berusia di atas 20 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dan deskriptif kualitatif.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kesepakatan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2018:124). Data yang ingin diperoleh dari teknik ini adalah data yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan ekonomi dengan membagikan angket kepada masyarakat. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki pengetahuannya terkait dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah kepala kampung, sekretaris kampung. Terkait dengan instrumen penelitian, sebelum data dikumpulkan terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan dimana setiap daftar pertanyaan diberikan pilihan jawaban “ya” dan “tidak”.

## 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi). Dalam teknik ini, akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Menurut Eriyanto (2011:305) Tahap awal dari analisis data ialah memberi deskripsi terhadap temuan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan temuan data yang telah terkumpul. Teknik ini digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian kedua terkait dengan penilaian masyarakat.

Kriteria Rasio Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama dan ketiga. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Dana Desa

Anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk program pembangunan yang berbagai macam sehingga masing-masing desa memiliki standar kecukupannya sendiri. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan kunci terkait dengan pengelolaan dana desa yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap evaluasi.

#### a) Tahap Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa disusun oleh sekretaris desa/kampung (sekdes/sekam). Dalam mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dahulu menyusun Rancangan peraturan Desa (Raperdes) APBDes. Kemudian Kepala Desa (Kades) menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rancangan pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. BPD penyelenggaraan musyawarah desa paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kampung Beyom Jaya, mengatakan bahwa “tahap perencanaan dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa atau yang disebut Musrembang Desa dalam tahun sebelumnya, misalnya di tahun 2021 bulan November atau bulan Desember dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan kampung untuk tahun 2022”. Hal senada disampaikan oleh sekretaris kampung “tahap perencanaan anggaran yang dilakukan selama ini awal kita harus musyawarah kampung itu kita terjun ke RT, RW dana desa yang kira kira yang tujuan kita bangun apa saja tapi yang jelaskan dari sekian usul itu dari setiap RT akan ada usulannya itu yang kita

ambil yang prioritaskan nantikan pas (Musrembang) Musyawara rencana pembangunan kampung itu yang bisa dilakukan bulan Februari, atau Maret dari sekian banyak usulan itu ada program prioritas yang memang di peruntukan masyarakat jadi harus melalui musyawara dulu perencanaan dulu musyawara itu setelah musyawara baru kita tentukan anggaran.

Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa, paling lambat bulan juni tahun berjalan, kepala desa membentuk tim penyusunan RKP desa yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) paling banyak (sebelas) orang, terdiri dari: (a) Kepala desa selaku pembina, (b) sekretaris desa sebagai ketua, (c) Ketua LPM selaku sekretaris, (d) anggota.

Dalam hal pelibatan masyarakat, Kepala Kampung juga mengatakan bahwa tidak semua masyarakat tetapi perwakilan dari ketua RT, ketua RW, Badan Musyawarah Kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan kelompok kesenian yang ada di kampung Benyom Jaya selalu diundang dan hadir. Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh sekretaris kampung “perencanaan melibat masyarakat kampung yang mana aparat kampung terjun ke RT,RW jadi supaya masyarakat tau gitu iyo kita punya dana desa sekian persen usulan dari RT,RW ini apa RT,RW, ini apa dan RT,RW nanti dari usulan itu kita tampung kita jadikan (Musrembang) Musyawarah rencana pembangunan kampung di balai kampung kita lakukan setiap tahun”.

Terkait dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat kampung. Kepala kampung menyatakan bahwa “Musyawarah telah dilakukan tentu mengambil dasar pertama tidak lepas juga dari petunjuk teknis penggunaan dana desa yang diturunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kemudian diturunkan lagi ke desa supaya tujuannya untuk mensinergikan anggaran pusat dengan di desa dalam konteks membangun perekonomian masyarakat di desa”.

Namun sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris kampung yang mengatakan bahwa Iya itu wajib harus maksudnya program pemerintah itu intinya memang untuk menuntun masyarakat jadi program kalau kita secara pribadi mungkin yang harus legislasi di kantor kampung ini yang punya sendiri memang tidak bisa tetap kita harus dari bawah dari usulan dari bawah contohnya harus perbaiki drainase RT,RW perbaiki irigasi di RT,RW tetap harus memandang dari bawah tadi jadi usulan dari bawah tadi jadi usulan dari bawah / masyarakat kita tampung semua ada berapa dan nanti kita musrembangkan.

Menurut hasil wawancara dengan sekretaris kampung terkait dengan perencanaan yang telah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat “Ini yang sudah berjalan contohnya seperti (BUMDES) badan usaha milik desa itu kan desa punya sedikit membantu itulah intinya buat sedikit sudah membantu di bumdes itu ada simpan pinjam walaupun besaran bagetnya sebesar pengeluaran kemampuan bumdes kan dasarnya sekian juta umpamanya 1 juta atau 2 juta untuk usaha milik produksi jadi perencanaan yang kemarin memang terlaksa dari tahun 2018 kalau sudah berjalan dari tahun 2018 ,2019,2020,2021,2022 sudah 4 tahu berjalan BUMDES itu yang nampak sebenarnya untuk 4 tahun terakhir ini”

Namun bila merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan dengan cara: (a) Terlibat aktif dalam setiap tahap penyusunan prioritas penggunaan dana desa, (b) Penyampaian usulan program dan atau kegiatan, (c) Memastikan prioritas. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian, karena setiap masyarakat perlu dilibatkan secara aktif.

Perencanaan pengelolaan dana desa pada Kampung benyom Jaya belum secara penuh melibatkan partisipasi masyarakat, selain itu dalam setiap perencanaan, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa namun belum dimuat dalam Rancangan APBDes.

#### b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Berhubungan dengan tahap pelaksanaan yang menggunakan dana desa. Menurut kepala kampung “berdasarkan Musrembang jadi ada hal yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dan ada hal juga yang dijawab oleh pemerintah desa yakni yang menjadi keputusan bersama di desa.

Pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada dana desa di antaranya adalah pembangunan fasilitas fisik seperti jalan kampung, jembatan, dan bangunan sekolah PAUD, Talut untuk irigasi.

### Tabel 1.

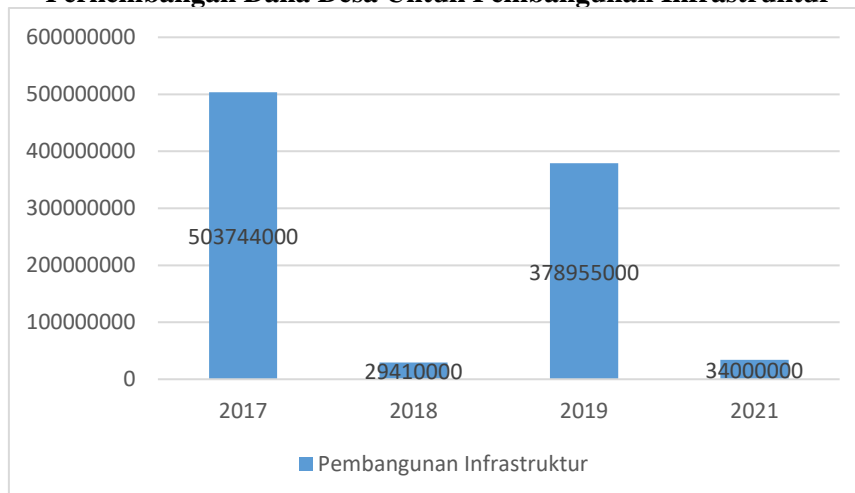
**Pelaksanaan Pembangunan Fisik Bersumber Dari Dana Desa**

Tahun	Program	Anggaran
2017	1. Pembangunan Jalan	90.000.000
	2. Pembuatan Talut Sepanjang 400 m	240.000.000
	3. Pembuatan talut menuju Lapangan sepakbola	60.000.000
	4. Pembuatan talut wilayah pasar	60.000.000
	5. Pembuatan jembatan	23.006.000
	6. Pembuatan pagar SD	30.738.000
2018	1. Pembangunan bangunan PAUD	10.000.000
	2. Pembangunan wahana bermain	5.410.000
	3. Pembangunan saluran air	14.000.000
2019	1. Draenase wilayah RT 07 s/d 11 sepanjang 100 meter	315.994.000
	2. Pembangunan drainase wilayah RT s/d 11	62.961.000
2021	1. Pembuatan pagar sekolah PAUD	10.000.000
	2. Karang timbunan 240 ret	24.000.000

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, talut, dan jembatan. Tahun 2018, digunakan untuk pembangunan wahana bermain PAUD, Bangunan PAUD, dan saluran irigasi. Pada tahun 2019, digunakan untuk pembangunan saluran drainase. Pada tahun 2021, digunakan untuk pembuatan pagar sekolah, dan penimbungan jalan.

**Gambar 1.**  
**Perkembangan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur**



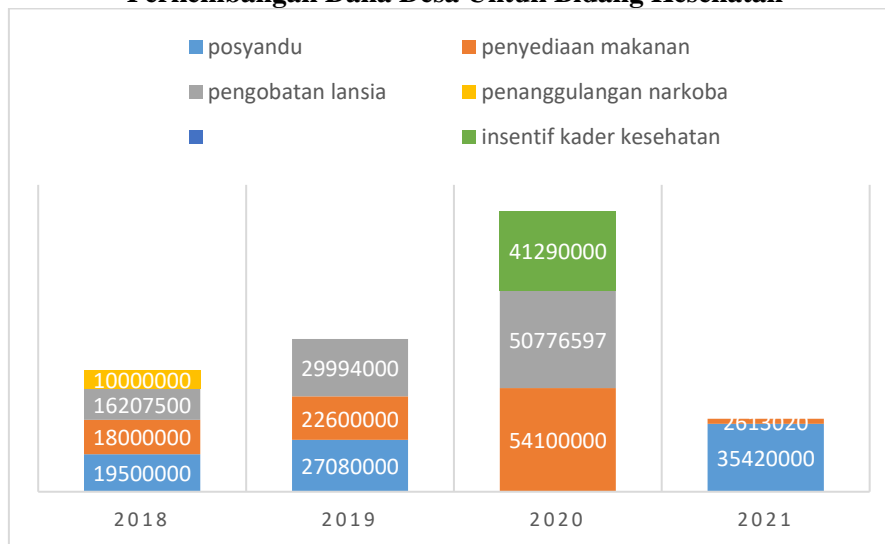
Pada gambar di atas, terlihat bahwa dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa mengalami trend naik turun. Pada tahun 2017 dana desa untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih tinggi dibandingkan lebih dengan tahun setelahnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, terjadi penurunan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp.

474.334.000, di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp. 349.545.000. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 344.955.000

Berdasarkan paa hasil wawancara dengan Sekretaris kampung “pada tahun 2017 difokuskan untuk membangun sarana dan prasarana penting bagi desa sehingga dana difokuskan lebih untuk pembangunan sarana tersebut”. Pada tahun 2018, terjadi penurunan karena ditiitik beratkan pada “Penguatan modal (BUMDES). Pada tahun 2019, terjadi peningkatan, karena ada beberapa infrastruktur yang perlu dibangun seperti pembangunan gorong – gorong, drainase, dan penimbunan jalan – jalan yang rusak, terus penimbunan jaan – jalan produksi yang rutin diperbaiki”. Pada tahun 2021, terjadi penurunan anggaran desa untuk pembangunan infrastruktur karena sebagian besar dana tersebut difokuskan pada bidang kesehatan sebagai upaya pencegahan covid-19.

Dari pelaksanaan kegiatan, tentunya ada program yang paling banyak menggunakan dana desa tersebut. Menurut Kepala kampung bahwa “kalau yang rutin penggunaan dana desa tiap tahun paling banyak adalah untuk pembangunan kesehatan di dalamnya ada kader posyandu balita, posyandu lansia, dan juga kader kesehatan.

**Gambar 2.**  
**Perkembangan Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan**



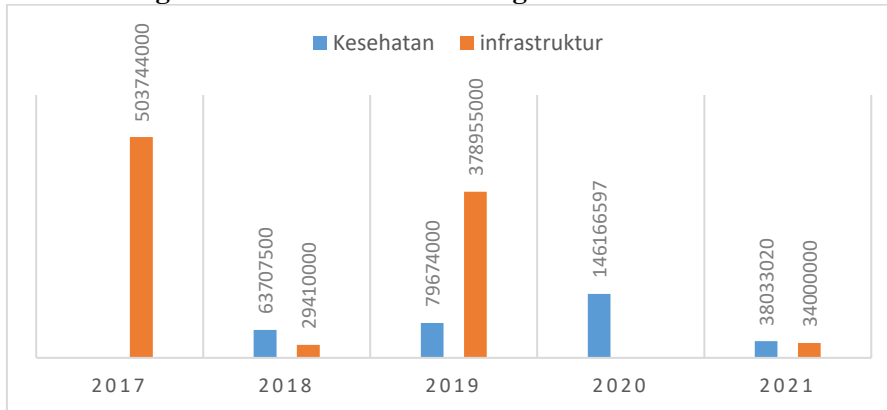
Pada gambar di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan penggunaan dana desa di bidang kesehatan, dan terus meningkat di tahun 2020, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021. Peningkatan dana untuk pengobatan lansia di tahun 2019 sebesar Rp 13.986.500, dan di tahun 2020 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 20.782.597. Adapun untuk penyediaan makanan, mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp. 4.600.000, di tahun 2020 meningkat lagi sebesar Rp. 31.500.000, namun mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar Rp. 51.486.980. untuk kegiatan posyandu, mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp. 7.580.000, dan pada tahun 2020 tidak dianggarkan, namun pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 35.420.000

Dana desa yang sekian banyak dipakai dalam hal kesehatan ini tidak nampak secara fisik karena pada prinsipnya dalam hal pembelian obat-obatan, alat pemeriksaan sekali pakai yang mana setelah dipakai langsung dibuang sehingga tidak nampak kelihatan di masyarakat.

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh sekretaris kampung “Yang menggunakan dana desa paling banyak yaitu infrastruktur sekitar 50% separuhnya bahkan sampe 70% yang kegiatan – kegiatan lain bisa yaitu kegiatan keagamaan yang sifat tidak terlalu konduksif kalau jalan paling banyak sampe 500 ret karang yang ditimbun untuk jalan sekian kilo yang dinominalkan hampir 300 juta itu semua termasuk sewa alat berat, dan mesin pemadat karang kalau Cuma ditimbun saja hasilnya tidak maksimal dan jalan mudah rusak.

**Gambar 3.**

**Perkembangan Dana Desa Untuk Bidang Kesehatan dan Infrastruktur**



Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dana desa sangat difokuskan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pada tahun 2018 sebagian dana desa telah dialokasikan untuk bidang kesehatan dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan infrastruktur. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan pembiayaan infrastruktur yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 demikian juga halnya dengan bidang kesehatan yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, dana desa ditiadakan untuk infrastruktur, namun untuk kesehatan dialokasikan dengan porsi yang ditingkatkan. Pada tahun 2021, porsi dana desa untuk kesehatan dan infrastruktur hampir sebanding.

Pelaksanaan tersebut perlu untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berapa besaran dana yang telah digunakan, hal ini sangat peting agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana desa tersebut. Transparansi penggunaan dana desa sangat penting bagi masyarakat. Kepala kampung juga mengatakan bahwa “penggunaan dana desa telah dilakukan secara transparan, pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengedepankan transparansi sehingga setiap tahun setelah Musrebang, kemudian kita membuat rencana kerja pemerintah kampung setelah itu kita menyusun anggaran pendapatan belanja kampung atau yang disebut APBK Kampung yaitu dalam hal mewujudkan transparansi maka kita selalu memasang tulisan atau baliho pada perempatan-perempatan jalan supaya masyarakat mengetahui anggaran yang dialokasikan.

Hal senada disampaikan oleh sekretaris kampung, transparansi telah dilakukan dengan pemasangan baliho di setiap jalan-jalan atau didepan kantor kampung agar masyarakat tahu bahwa dana setiap tahun yang diturunkan dari pusat ke kampung atau desa yang disebut itu (APBK) Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang kita paparkan di baliho bahwa supaya masyarakat tahu bahwa anggaran dana kampung dipergunakan untuk ini loh dana kampung sekian untuk ini karna pada saat Musrebang kita mengundang dari setiap RT,RW perwakilan 3 atau 4 orang memang dalam beberapa tahun terakhir dana desa yang paling banyak dipergunakan untuk (BLT) bantuan lembaga tani 392 juta.

Penggunaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat telah dilakukan dengan melibatkan lembaga ekonomi. Menurut Kepala Kampung “untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebenarnya kita lebih fokus melalui lembaga ekonomi dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Kampung. Ketika kampung mengikut sertakan penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Kampung maka dalam setiap tahun anggaran ketika tutup buku dimana hasil pengelolaan Bumkam itu ada 25 persen kembali ke desa.

Kepala desa juga mengatakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kita lagi merintis untuk pertanian. Melalui peternakan dengan adanya Bumdes kita mampu menyediakan bahan dasar pokok kebutuhan rumah tangga yang relatif lebih rendah dibandingkan pedangan lain seperti kios dan pengecer yang ada di kampung.

Hasil wawancara dengan sekretaris kampung mengungkapkan bahwa Perekonomian kalau untuk di kampung sini itu kita ada (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa jadi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat untuk di kampung sini itu simpan pinjam itu dengan penguatan modal (BUMDES) untuk perekonomian contohnya dari (BUMDES) kita pinjam 5 juta maka setiap bulan kita

akan kembalikan uang pinjaman ke (BUMDES) sesuai dengan kesepakatan dari (BUMDES) dalam jangka waktu 1 tahun dan bunganya tidak besar sekitar 900 ribu dana itu kita kelola agar perekonomian masyarakat kampung berjalan dengan baik dan stabil kalau di kabupaten (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah.

c) Tahap Pengawasan

Pengawasan dalam penggunaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik. Menurut kepala kampung "Bamuskam telah melakukan fungsi pengawasan dengan cukup baik. Bamuskam melakukan pengawasan penggunaan dana kampung dan itulah keterlibatan lembaga yang ada di kampung untuk mengawasi penggunaan dana desa. Kepala kampung juga menuturkan bahwa pengawasan penggunaan dana desa tidak melibatkan masyarakat kampung secara langsung, karena pengawasan telah dilakukan oleh Bamuskam sebagai wujud dari representasi masyarakat kampung karena dipilih langsung oleh masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh sekretaris kampung "Pengawasan itu terutama dari masyarakat sebenarnya terus perwakilan masyarakat itu ada (BAMUSKAM) Badan Musyawara kampung terus yang terakhir itu dari spektorat kalau dana desa kalau dana desa itu bukan dari Inspektorat saja (BPKP) itu setiap tahun didatangi setiap kampung atau desa jadi dana yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun ke desa atau kampung itu tidak terbuang sia – sia seperti pembangunan rumah – rumah tempat tempat ibadah dan itu ada pengawasannya supaya laporan kampung itu bukan laporan fiktif atau yang di buat – buat tetapi ada pembangunan riil dilapangan yang dibuat. Menurut sekretaris kampung pengawasan juga perlu melibatkan masyarakat kampung karna dilapangan itu melibatkan masyarakat kampung dan dana desa itu digunakan untuk apa apakah berjalan dengan baik atau tidak karna kalau setiap tahun pencairan dana kampung itu kita melibatkan aparat kepolisian, babinsa, dan dari koramil supaya aparat juga tau dana desa itu dipergunakan untuk pembangunan apa saja.

Sekretaris kampung juga mengatakan bahwa Yang memiliki tanggung jawab penuh adalah kepala kampung karna dia yang mengatur dan mengelola dana desa atau yang disebut dana kampung yang dipergunakan atau untuk membangun apa saja yang ada di desa yang di butuhkan masyarakat kampung.

d) Tahap Evaluasi

Pernah dilakukan kegiatan evaluasi penggunaan dana desa, menurut kepala kampung "dalam hal melakukan evaluasi setelah mempertanggung jawabkan program kegiatan terus kemudian kita akan masuk dalam agenda Musrembang itu sebelum musrembang dimulai kita lakukan evaluasi anggaran tahun sebelumnya. Kepala kampung menambahkan "kegiatan evaluasi yang dilakukan kita juga tetap melibatkan dan mengundang ketua RT, RW, Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk semua agar bisa menjawab bisa melihat bahwa anggaran tahun yang telah dijalankan itu sudah mencapai realisasi sekian persen itulah bentuk transparansi yang selama ini kita lakukan. Menurutnya, evaluasi melibatkan masyarakat kampung yang melibatkan perwakilan dari masing-masing RT sebanyak 2 atau 3 orang.

Sama seperti yang sampaikan oleh sekretaris kampung bahwa Setiap dana cair kita melakukan evaluasi kita mengundang Bamuskam, RT, RW perwakilan 2 atau 3 orang agar masyarakat tahu bahwa dana kampung ini dipergunakan untuk pembangunan apa saja. Di forum terbuka dan semua orang bisa memberikan masukan atau saran contohnya penanggung jawab di lapangan tentang penimbunan jalan atau pengaspalan kenapa penimbunan jalan Cuma 1 kilo atau pengaspalan kenapa kurang tebal jadi untuk itu kita harus memberikan saran dan masukan.

Evaluasi melibatkan masyarakat dari setiap RT, dan RW kita melibatkan masyarakat kampung contohnya dari RT perwakilan 7 atau 8 orang, dan dari RW sama juga 7 atau 8 orang, dan dari tokoh masyarakat juga sama 7 atau 8 orang, tokoh agama, tokoh PKK, dan tokoh adat, Bamuskam dan lain sebagainya intinya setiap evaluasi kita mengundang masyarakat untuk hadir dan menyaksikan dan mengevaluasi tentang program – program apa saja yang harus kita kerjakan atau yang kita buat.

## 2. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi

Tabel 2.  
Perhitungan Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Tahun	Alokasi Dana Desa	Alokasi Bidang Pembangunan Ekonomi		Efektivitas	Keterangan
		Target	Realisasi		
2017	791443000	600000000	550738000	91.78966667	Efektif
2018	737934000	400000000	266707500	66.676875	Kurang efektif
2019	844934000	600000000	625000000	104.1666667	Sangat efektif
2020	1152273961	400000000	127711194	31.9277985	tidak efektif
2021	872711000	400000000	302759620	75.689905	kurang efektif

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat tergolong efektif dengan tingkat efektivitas (91,78%). Pada tahun 2018, penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga tingkat efektivitasnya menurun dan berada pada posisi kurang efektif (66,67%). Tahun 2019, terjadi peningkatan penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat bahkan dapat dikatakan realisasi anggaran melebihi target anggaran dengan tingkat efektivitas (104,16%) yang artinya sangat efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi hal ini tentunya dipengaruhi oleh situasi pandemi covid-19 sehingga sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19, tingkat efektivitas pada tahun 2020 sebesar (31,92%) dan tergolong tidak efektif. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat ke level (75,68%) namun masih tergolong kurang efektif.

## 3. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data primer melalui wawancara 2 informan kunci (Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi di Kampung Benyom Jaya 1 didapatkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap evaluasi. Namun pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat belum secara penuh. Padahal partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan sangat diperlukan demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkualitas sehingga prioritas pembangunan benar-benar ditujukan kepada masyarakat demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum, pengelolaan dana desa dapat dikategorikan cukup baik, hal ini sesuai dengan pendapat Admosudirjo (2005) yang mengatakan bahwa pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan seluruh faktor sumber daya dan berdasarkan pada perencanaan untuk menyelesaikan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah terlaksananya semua tahapan dengan maksimal agar dana desa dapat mencapai sasaran utama.

Pada tahap perencanaan, telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Perencanaan dimaksudkan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Apa yang dilakukan dalam perencanaan di kampung benyom Jaya 1 mendukung pernyataan Listyansih (2014), perencanaan dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan karena sifat rencana itu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan, setiap perencanaan yang ada pada program kegiatan kemudian diatualisasikan. Terkait dengan pelaksanaan dana desa telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik untuk pembangunan infrastruktur fisik, maupun kegiatan lainnya. Kegiatan ini, tentunya sangat relevan dengan pendapat yang disampaikan oleh Mulyadi (2015), pelaksanaan berpedoman pada

aktivitas untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan dalam suatu keputusan. Kesamaannya terletak pada sesuatu yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai tujuan.

Tahap pengawasan, dalam pengelolaan dana desa dimana masyarakat tidak terlalu berperan penting namun peran pengawasan diberikan kepada Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sebagai lembaga representasi masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bamuskam adalah melakukan pengecekan terhadap realisasi penggunaan dana desa. Hal ini mendukung pandangan Siagian (2004), pengawasan dapat dimaksudkan sebagai tindakan mengatami dan memantau kegiatan di lapangan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan di Kampung Benyom 1 adalah dengan melibatkan aparat kepolisian, Babinsa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan anggaran yang digunakan dapat secara efektif mencapai sasaran.

Tahap evaluasi, pengelolaan dana desa terus dilakukan evaluasi dengan mengundang Bamuskam, RT, RW, dan perwakilan dari setiap RT dan disampaikan pada forum terbuka dimana setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan atau perencanaan pembangunan ke depan. Apa yang telah dilakukan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Yunanda (2009), evaluasi sebagai aktivitas terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek melalui penggunaan instrumen dan hasil perbandingan dengan tolok ukur tertentu. Dalam hal ini tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah kampung Benyom Jaya 1 adalah target dan realisasi.

#### **4. Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi**

Hampir sebagian besar masyarakat Benyom Jaya adalah masyarakat pendatang. Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner yang penulis lakukan kepada 50 responden. Sebagian besar (94%) mengatakan bahwa penggunaan dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana desa telah dilaksanakan untuk melakukan perbaikan berbagai infrastruktur seperti jalan, irigasi yang mana infrastruktur tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka.

Selain itu, masyarakat juga memberikan penilaian yang positif terhadap bantuan sosial yang diberikan lewat dana desa. Melalui bantuan tersebut, sebagian besar masyarakat yang mata pencahariannya adalah pengusaha dapat tertolongkan karena pada tahun 2021 ketika pandemi covid-19 melanda sebagian usaha harus ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi pendapatan pengusaha yang usahanya tidak dapat beroperasi akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Penelitian ini membenarkan pernyataan (Maya Macia Sari, Noni Ardian, 2021) memanfaatkan dana bantuan pemerintah untuk berdagang dan melakukan penghematan pengeluaran dana. persepsi masyarakat tentunya dipengaruhi oleh pendidikan yang dimiliki, sehingga mereka dapat secara rasional memberikan penilaian.

#### **5. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi**

Berdasarkan pada hasil analisis diperoleh bahwa selama lima tahun penggunaan dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan ekonomi kampung menunjukkan tingkat efektivitas yang beragam. Namun secara garis besar dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya baik dan benar, seperti yang dikatakan oleh F Drucker bahwa sesuatu dikatakan efektif apabila melakukan pekerjaan dengan benar.

Rendahnya efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi disebabkan oleh pengalokasian dana yang cukup besar pada bidang kesehatan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia Novita Sari (2017) dimana penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan dana kampung memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat kampung. Hasil yang berbeda yang penulis dapatkan dengan penelitian Yunita adalah karena penelitian ini menggunakan data sebelum dan saat covid-19 mewabah. Penelitian ini juga mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karo, 2018; Roy Stevensen Iver Turere, Deddy Rotinsulu, 2018; Pangke, Kumenaung and Tumilaar, 2021) yang mengatakan bahwa pemanfaatan dana desa telah menunjukkan hasil yang efektif.

## **PENUTUP**

## **1. Kesimpulan**

- a. Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura Sangat cukup baik dalam meningkatkan ekonomi kampung. 96% responden mengatakan bahwa pengelolaan dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, sedangkan 4% responden mengatakan bahwa pengelolaan dana desa belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura.
- b. Persepsi masyarakat tentang penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi Kampung Benyom Jaya Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura sangat positif. 94% mengatakan bahwa penggunaan dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi kampung, hal ini karena dalam mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah.
- c. Penggunaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi kampung belum efektif, yang disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi anggaran desa sesuai dengan target anggaran

## **2. Saran**

- a. Bagi Pemerintah Desa  
Pemerintah desa perlu melakukan peningkatan anggaran yang proporsional pada program atau kegiatan yang ada pada bidang penyelenggaraan pembangunan agar mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa
- b. Bagi Masyarakat  
Masyarakat perlu secara aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sebab selama ini peran pengawasan hanya dijalankan oleh Bamuskam
- c. Bagi Peneliti selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya, perlu menggunakan pendekatan yang lebih dan analisis yang lebih mendalam serta menggunakan instrumen yang lebih banyak agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisas, Raharjo, 2006 *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Makassar.
- Arsyad Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Boedijono, Boedijono et al. 2019. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 4(1): 9– 20.
- Demaris Deisy Pasuhuk, Johannis Kaawoan, and Sofia E. Pangemanan. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Governance* 1(1): 1–8.
- Irmansyah, Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid. 2021. "Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4(2): 1086– 95.
- Karina Poluan, Florence D. J. LEngkong, and Very Y. Londa. 2021. "Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)." *JAP VII*(102): 43–52.
- Pangke, I N P, A G Kumenaung, and Tumilaar. 2021. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sangihe (Studi Kasus Kecamatan Tamako)." *EMBA* 9(2): 297–305.
- Ratih. 2021. "Dana desa sudah mengalir Rp 50,5 triliun per 4 Oktober 2021", <https://newssetup.kontan.co.id/news/dana-desa-sudah-mengalir-rp-505-triliun-per-4-oktober-2021>, diakses pada 15 November 2021
- Saputra, I Wayan, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kitamani, kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. ejournal, USU, Medan
- Teki Pangalo, Deddy Rotinsulu, and Tumangkeng. 2020. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talalud." 20(03): 110–25.